

STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI PROVINSI RIAU

Oleh
Khairul Rahman

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR
Email : khairul_rahman87@yahoo.co.id

ABSTRAK

The village is a governance structure that strengthens the State of Indonesia, in addition to the largest population in the village, livelihood was apparently made an enormous contribution to the independence of this nation. Reality is now the village is the weak link that should get the attention of government. During these rural areas are characterized among other things by the low level of labor productivity, there are still high levels of poverty, and the poor quality of rural residential environment. One way that can be done to solve some of the problems in rural areas by creating strategies that increase in rural investment to rural resource management in improving the rural economy. The main problem in this research is How the Strategy to Increase Investment in Enhancing Rural Economy Village in the province of Riau. This type of research used in this research is descriptive. This research is quantitative descriptive part of the present stage of the further observation that led to the role of statistical techniques. The location of this study covers 7 districts in Riau province namely Sengingi Regency Kuantan, Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir and Siak. Results of the study found, there is a common strategy and specific strategies to increase rural investment rural resource management in improving the rural economy

Keywords : Strategy , Investment , Village

Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah Provinsi dan setiap daerah/wilayah Provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada setiap daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan.

Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan mata rantai dari sistem pemerintahan nasional yang bermula dari sistem pemerintahan pusat, daerah dan Desa yang merupakan mata rantai yang terakhir. Dikatakan oleh Wasistiono (Dalam Rauf, 2010 : 45) Desa merupakan pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke

tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Jadi keberadaan desa selama ini memiliki posisi yang penting baik sebagai alat mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia.

Melihat pentingnya kedudukan desa di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan Realita saat ini, dimana desa merupakan mata rantai terlemah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan. Desa merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia. Selain jumlah penduduk terbesar berada di

desa, mata pencarian pun ternyata memberikan sumbangsih besar bagi kemandirian bangsa ini.

Masih banyaknya masalah pedesaan yang perlu mendapatkan perhatian seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidak seimbangan struktur ataupun keterbelakangan pendidikan, Kenyataan ini telah membuktikan meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam, tetapi kesatuan masyarakat pedesaan tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan nyata guna memenuhi kebutuhan sendiri. Desa seperti ini tidak lagi mampu menjadi tempat hidup dan penghidupan yang layak bagi warganya. Indikatornya adalah semakin banyaknya warga desa yang bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

Pada dekade tahun tujuh puluhan, Schumacher dalam bukunya *Small is Beautiful* (Dalam Wasistiono dan Irwan Tahir, 2006 : 3) telah mengingatkan bahwa persoalan pokok yang dihadapi Negara-negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Schumacher berpendapat bahwa selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak akan dapat diselesaikan, dan mau tidak mau pasti akan lebih memburuk.

Berangkat dari pemikiran diatas dan memahami masalah yang di hadapi oleh desa pada umumnya, maka salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di pedesaan yakni dengan penyusunan strategi peningkatan investasi pedesaan untuk pengelolaan sumber daya pedesaan dalam meningkatkan perekonomian pedesaan.

Penyusunan strategi peningkatan investasi pedesaan untuk pengelolaan sumber daya pedesaan dalam

meningkatkan perekonomian pedesaan merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah pembangunan di pedesaan khususnya di Provinsi Riau. Mengutip pendapat Nutt dan Backoff (dalam Muhammad, 2012 : 64) merumuskan langkah sederhana dalam melakukan manajemen strategi suatu organisasi pemerintah yang proses desainnya ditunjukkan dalam enam tahapan, yaitu : Konteks sejarah, Penilaian situasi, Agenda isu strategis, Opsi strategis, Penilaian kelayakan; dan Implementasi strategi.

Negara sebagai agen perubahan untuk meningkatkan investasi masyarakat berjalan lancar maka ada beberapa kebijakan yang perlu dibangun oleh pemerintah yakni: kemandirian investasi, pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang lengkap, seperti jalan, listrik (elektrifikasi), pasokan gas untuk industri dalam negeri, kurangi dan hilangkan kesenjangan regional antara daerah satu dengan daerah yang lain, buat daerah dan pedesaan yang ada lebih menarik para investor, sebarakan investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri, berikan insentif yang menarik kepada investor seperti pelayanan perizinan yang memudahkan dan transparan, cepat, tepat, dan murah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pada pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni Bagaimanakah Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Riau?

Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Riau.

b. Kegunaan

Dari kegiatan penyusunan strategi peningkatan investasi pedesaan dalam meningkatkan perekonomian desa maka dapat dirumuskan kegunaan kegiatan penelitian adalah :

- Dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai strategi peningkatan investasi pedesaan untuk mengelola sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan perekonomian di pedesaan sehingga kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya di wilayah Provinsi Riau benar-benar bisa terwujud.
- Dengan adanya penyusunan strategi peningkatan investasi pedesaan akan menciptakan pengelolaan sumber daya di pedesaan yang terencana dan terintegrasi sehingga menghasilkan pembangunan pedesaan yang efektif dan efisien
- Meningkatkan kinerja pemerintah, terumuskannya strategi peningkatan investasi pedesaan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada di pedesaan.
- Adanya sinkronisasi yang berkesinambungan terhadap penataan pembangunan perdesaan yang disesuaikan dengan pembangunan jangka pendek, menengah dan tahunan
- Terselenggaranya pembangunan pedesaan yang lebih tanggap akan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta pembangunan perdesaan yang komprehensif, terarah dan terpadu dengan mengedepankan skala prioritas penataan pembangunan pedesaan.

LANDASAN TEORI

Pemerintahan : Peran Penting Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayangkannya. (Ndraha, 2003 : 6)

Lebih lanjut Ndraha mengatakan (dalam Labolo, 2006 : 24-25) Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Apapun yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya.

Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu munculnya dua kelompok besar yang memerintah dan yang diperintah.

Government is a body of people that sets and administers public policy, and exercises executive, political, and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.

Maksudnya, Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan

melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah negara.

Tujuan utama dibentuknya Pemerintah menurut Rasyid (2002 : 14-16) adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Setelah memahami tentang makna pemerintahan diatas jelaslah bahwa pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan salah satu indikatornya adalah meningkatkan perekonomian pedesaan. Selain itu perlu juga dipahami penyusunan strategi peningkatan investasi pedesaan dalam rangka meningkatkan perekonomian juga tidak terlepas dari konsep *governance*.

Menurut Syafiie (2011 : 142) *Good Governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah.

Di dalam *good governance* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat, yaitu :

1. *Good Public Governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislative, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan
2. *Good Corporate Governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik
3. *Civil Society* atau masyarakat sipil yang dapat mendukung terwujudnya *good governance* dan terutama *good public governance*

Oleh karena itu menurut Ismail (dalam Awang dan Mendra Wijaya, 2012 : 51) *good public governance* dapat diwujudkan apabila terjadi keseimbangan peran dari ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintah (legislative, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi terwujudnya *good public governance* dan memberikan peluang terbangunnya komponen lain dalam *governance* yaitu dunia usaha dan masyarakat.

Lebih lanjut, Adisasmita (2011 : 25) mengatakan dari aspek pemerintahan (*government*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

1. Hukum/Kebijakan.
Hukum/Kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Kompetensi administrative dan transparansi.
Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model

- administrative, keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
 4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan makro ekonomi.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian pedesaan tentunya dalam penyusunan strategi peningkatan investasi pedesaan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Wasistiono (2003 : 126) otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan bangsa. Disebut peluang karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumberdaya yang telah diserahkan, daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya sosial-budaya. Daerah dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal yang berupa uang, (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*) maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

Adapun peranan penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari : Diversifikasi kegiatan ekonomi, Mengembangkan infrastruktur, Meningkatkan tabungan dan inventasi, Meningkatkan taraf pendidikan, Mengembangkan institusi yang meggalakkan pembangunan, Merumuskan

dan melaksanakan pembangunan ekonomi, dan menciptakan kesetabilan sosial, politik dan ekonomi.

Strategi Investasi

Sudah saatnya sistem perencanaan daerah dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Daerah yang berwawasan strategik. Pola lama yang melihat dan memperlakukan kebijaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan ekonomi nasional dengan bias sektoralnya perlu secara berangsur ditinggalkan, dan kemudian digantikan dengan kemandirian Daerah Otonom untuk merencanakan pengembangan daerahnya.

Master plan pengembangan daerah akan semakin mengambil peran dalam proses manajemen pengelolaan pembangunan Daerah Otonom, dan pada tahap awal perlu dibangun dan dimiliki oleh Daerah Propinsi. Master Plan Pengembangan Daerah ini akan merupakan acuan untuk arah kegiatan pembangunan wilayah dari sekelompok Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (azas sinergi hubungan antar daerah). Disatu pihak rencana ini merupakan peralatan sinkronisasi dalam penyusunan pengembangan rencana sektor Departemen pada tingkat propinsi, tetapi dilain pihak merupakan peralatan sinkronisasi skenario perekonomian pada skala makro (azas NKRI).

Dalam master plan ini secara minimal perlu disusun suatu swot analysis yang dihadapi oleh Daerah Propinsi, berikut identifikasi kendala-kendala yang dihadapi masing-masing Daerah Otonom didalamnya. Atas dasar analisa tersebut selanjutnya dijabarkan visi dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka panjang, yang dalam proses perumusannya akan melibatkan seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berikut para wakil rakyat (DPRD) di propinsi tersebut (azas participatory democracy).

Atas dasar analisis swot berikut penetapan visi dan misi ini selanjutnya dapat dirumuskan berbagai strategi pengembangan daerah yang meliputi strategi investasi dan promosi, strategi pembangunan infrastruktur dan social overhead capital; strategi penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan lahan; strategi mobilisasi dana dan anggaran; dan strategi perumusan kebijaksanaan daerah. Pada tingkatan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, berbagai jenis rencana tindakan (Action Plan) yang merupakan wujud pelaksanaan strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dirumuskan secara detail menurut kebutuhan dan kemampuan masing-masing Daerah Otonom.

Namun demikian, dengan mengacu pada berbagai pendekatan dan model teoritis dalam pengembangan daerah, strategi pengembangan investasi di daerah dapat dipilih dari beberapa bentuk strategi investasi berikut ini:

- Strategi pengembangan leading/key industry
- Strategi growth center melalui kawasan industri terpadu
- Strategi pengembangan ancillary industry
- Strategi pengembangan kota
- Strategi pengembangan kehidupan lokal(neighborhood)
- Strategi pengembangan fasilitas umum skala besar
- Strategi pengembangan agropolitan dan pertanian terpadu
- Strategi pengembangan perlindungan lingkungan alam

Pada saat ini masih banyak lagi bentuk-bentuk strategi investasi pengembangan daerah yang sedang direncanakan dan dikembangkan oleh berbagai institusi pemerintahan daerah di Asia dan kawasan negara maju lainnya, khususnya yang dikaitkan dengan bentuk topologi, kondisi, kemajuan teknologi dan ketersediaan sumber-sumber pendanaan di masing-masing daerah. Untuk tujuan

pembahasan makalah ini kita mengkonsentrasikan hanya pada beberapa jenis strategi di atas.

Konsep Desa Di Indonesia

Penyebutan tentang Desa sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena istilah Desa pernah diseragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Kata “Desa” sendiri menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Irawan Tahir, 2006 : 7) berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan Norma, serta memiliki batas yang jelas.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipertegas bahwa di Indonesia dapat ditemukan banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan marga, bagi masyarakat Sumatera Selatan, dati di Maluku, nagari di Minang Kabaudan atau wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat Desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Selanjutnya Bintoro (dalam Wasistiono dan Irawan Tahir, 2006 : 8) yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan “suatu hasil dari perwujudan dari kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultur yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Sedangkan Desa menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa pengertian Desa sebagaimana termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya.

Menurut Dadang et.al (2003 : 3) mengartikan Desa sebagai komunitas yang tinggal sebuah lokasi (posisi geografi daerah) tertentu Desa dapat dikatakan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, oleh karena itu Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Mely G.Tan (dalam Silalahi, 2010 : 28-29) mengatakan penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini bagian dari deskriptif kuantitatif yakni menyajikan tahap yang lebih lanjut dari observasi yang memunculkan peranan teknik-teknik statistik. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian umum untuk melihat dan mempelajari sejauh mana perkembangan yang terjadi yang didasarkan pada suatu rencana, kebijakan, program, ketetapan dan intruksi.

Lokasi kajian ini meliputi 7 Kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak. Analisis data yang digunakan adalah terlebih dahulu dianalisis potensi dan peluang pada 7 Kabupaten tersebut. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah Location Quotient (LQ), Typhology Classen dan Shift Sahre Analysis. Selanjutnya perlu dilihat kelayakan usaha prioritas untuk masing-masing kabupaten.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Komponen utama yang membentuk iklim investasi di daerah terdiri dari; Kelembagaan pelayanan penanaman modal (16,9%), Promosi investasi daerah (15,6%), Komitmen Pemerintah Daerah (20%), Infrastruktur (9,8%), Akses lahan usaha (2,4%), Tenaga kerja (6%), Keamanan usaha (10,7%), Kinerja ekonomi daerah (3,1%), dan Peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah (3,6%). Sedangkan komponen-komponen yang menjadi hambatan bagi para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya adalah; infrastruktur, perijinan oleh pemerintah pusat, peraturan daerah, kenaikan tariff BBM/ listrik dan lain-lain, pajak/retribusi, kelangkaan bahan baku, *invisible cost*, kelangkaan modal, stabilitas dan hankam, upah minimum regional, pemasaran, kapasitas bisnis, memproses perijinan, bom/ terorisme, biaya pengapalan, dan ketepatan waktu.

Faktor-faktor yang menjadi daya tarik bagi dunia usaha dalam melakukan investasi, diantaranya adalah; ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, potensi yang dimiliki oleh suatu daerah/ wilayah, kebijakan investasi, SDM, serta jaminan kepastian keamanan Informasi yang dibutuhkan oleh investor, pada umumnya berupa kebutuhan investasi di suatu daerah, kebijakan investasi, potensi yang dimiliki, peluang usaha, sumber dan proyek investasi, serta contoh proyek

investasi yang ada di suatu daerah. Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada.

Berdasarkan informasi-informasi di atas maka strategi pengembangan pedesaan di Provinsi Riau dibagi menjadi strategi umum dan strategi khusus.

1. Strategi Umum

- a. Melakukan pengembangan usaha berdasarkan komoditi unggulan

daerah. Provinsi Riau memiliki komoditi unggulan sawit, sehingga perlu dilakukan pengembangan sektor ini sehingga memberikan multiplier efek kepada sektor lain. Pembangunan sektor non-migas yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan belum menunjukkan perkembangan yang berarti, walaupun potensi yang dapat dikembangkan cukup luas, seperti pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan agrobisnis; pemanfaatan hasil hutan non kayu; pariwisata; sektor informal dan usaha kecil menengah; dan industri rumah tangga.

Tabel 1
Arahan Sektor/Subsektor Unggulan Wilayah Riau

No	Sektor	Subsektor	Komoditas
1	Pertanian	a. Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Biji-bijian (padi dan jagung) • Kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, kedelai dll). • Umbi-umbian (talas, ubi kayu dll) • Sayur-sayuran (bayam, mentimun, selada dll) • Buah-buahan (rambutan, durian, manggis dll)
		b. Perkebunan	• Kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, sagu dll
		c. Peternakan	• Unggas, domba, sapi dll.
2	Kehutanan		• Aneka kayu komersial dan hasil hutan ikutan dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan rakyat.
3	Pertambangan	a. Minyak dan Gas Bumi	• Minyak bumi, gas bumi dan aneka produk turunannya.
		b. Pertambangan Umum	• Batubara, emas, timah dll.
		c. Bahan Galian	• Pasir bangunan, pasir kwarsa, batu granit dll.
4	Perikanan	a. Perikanan Darat dan Tambak	• Aneka produk perikanan air tawar dan tambak komersial (ikan, udang dll).
		a. Perikanan Laut	• Aneka produk perikanan laut tangkap &

			budidaya komersial (ikan, udang, cumi, kerang, rumput laut dll).
5	Pariwisata		• Aneka obyek & daya tarik wisata (wisata alam, agrowisata, wisata budaya, wisata konvensi, wisata belanja dll).
6	Industri	a. Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	• Aneka produk agroindustri (CPO, minyak goreng, makanan & minuman, crumb rubber dll). • Aneka industri hasil- hasil hutan (pulp, plywood, kayu gergajian, wood working dll).
		b. Industri Aneka	• Elektronika, komputer, garment/ tekstil dll.
		c. Industri Logam, Mesin dan Kimia	• Industri penunjang pemboran migas, pipa, perkapalan, aneka produk & bahan plastik dll.
7	Perdagangan Jasa	-	• Aneka komoditas perdagangan produk daerah maupun impor, serta jasa-jasa (jasa konstruksi, keuangan/perbankan, transportasi dll).

Sumber : (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, 2012)

- b. Melakukan penyelesaian status lahan. Pengusahaan lahan pertanian juga menghadapi permasalahan konflik penguasaan dan status lahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penguasaan lahan oleh petani sangat terbatas, sehingga menghadapi kendala dalam pengembangan skala usaha, Penguasaan sektor hilir oleh perusahaan berskala besar yang bersifat padat modal dan keahlian mengakibatkan hasil pertambahan nilai belum dinikmati oleh masyarakat lokal.
- c. Melakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Daerah dalam penentuan HGU. Hak Guna Usaha dan izin prinsip ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah hanya diberi wewenang untuk menentukan lokasi, tanpa melibatkan pemerintahan desa. Pemerintahan desa tidak memiliki hak negosiasi dalam penentuan jumlah dan luas lahan HGU.
- d. Pengembangan kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan. Potensi perikanan berupa ikan pelagis dan udang-udangan terdapat di sekitar Pulau Rumpi, Pulau Jemur, Pulau Lingga, Pulau Singkep, dan sekitar Selat Malaka. Di samping perikanan tangkap, potensi budidaya perikanan untuk jenis-jenis ikan kerapu, kakap putih, udang-udangan, dan rumput laut dapat diusahakan di pesisir dan perairan laut dangkal di sekitar Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, pesisir Rokan Hilir, dan Selat Malaka.
- e. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi.
- f. Pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya secara luas, baik obyek dan destinasi; prasarana dan

sarana pendukung; serta sumber daya manusia pelaku pariwisata, sehingga sebagian besar belum layak dijual kepada wisatawan. Provinsi Riau juga berfungsi sebagai lokasi transit wisatawan menuju Provinsi Sumatera Barat. Peluang kunjungan wisatawan mancanegara cenderung dimanfaatkan oleh Kota Pekanbaru yang memiliki prasarana pendukung relatif memadai, seperti hotel, transportasi, dan perbankan. Selain pariwisata alam dan budaya, potensi lainnya adalah pariwisata *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE); pariwisata bahari di Pulau Jemur, Pulau Rupa, dan Tanjung Medang untuk pasar wisatawan dari Singapura dan Malaysia; dan pariwisata yang ditujukan untuk segmen wisatawan nusantara.

- g. Meningkatkan keterlibatan BUMD dalam sektor usaha potensial. Pengembangan perekonomian membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi dan penataan ruang, kepastian hukum, dan pelayanan aparatur dalam administrasi umum. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan bidang pemerintahan dan aparaturnya menuju *good governance and clean government*. Oleh karena itu pengembangan usaha tentunya harus diprioritaskan BUMD dalam dunia usaha ini.

Strategi-Strategi Khusus Peningkatan Investasi Pedesaan untuk mengelola Sumberdaya Pedesaan.

- a. Pengembangan Industri Hilir berdasarkan keunggulan komoditi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip dasar diantaranya: (1) memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah, (2) memacu peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan, (3) memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan, (4) memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsistem agribisnis, (5) menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.

- b. Mengintegrasikan sektor usaha untuk peningkatan nilai tambah.

Beberapa kabupaten/kota yang memiliki sektor basis di lapangan usaha pertanian adalah Kab. Kuansing, Inhu, Rohil, Rohul, Kampar dan Pelalawan. Namun besarnya kontribusi sektor pertanian bukan berarti sektor industri pengolahan juga meningkat, atau memberikan dampak kepada sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu agar dapat menopang antar satu dengan lainnya perlu adanya integrasi input, proses dan output. Seperti industri hilir kelapa sawit untuk keperluan pakan ternak dan pakan ikan.

- c. Peningkatan ketersediaan energi listrik.

Peningkatan ketersediaan energi listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kuansing, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kuansing, Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTB) untuk kabupaten lainnya. Seperti di kabupaten kuantan singingi juga mempunyai sumber daya mineral yang cukup besar dan beragam, seperti batu bara, emas, sirtu, kaolin,

bentonite, bitumen padat, batu gamping dan mangan. Ada beberapa yang sudah dieksploitasi seperti batu bara, emas dan mangan. Berbagai potensi sumber daya mineral tersebut belum dikelola secara optimal, padahal sebenarnya merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan dan dapat menambah incam bagi masyarakat. Kabupaten Kuantan singingi memiliki potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik terdiri dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sungai kuantan yang berada dilubuk ambacang, kecamatan hulu kuantan sebesar 135 MW (studi JICA jepang), Potensi air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada didesa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik sebesar 136,6 Kw. Selain itu juga terdapat potensi energi biomassa yang berasal dari bahan baku perkebunan kelapa sawit yang belum dapat dihitung besarnya. (Sumber: Dinas energi dan sumber daya mineral)

d. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan.

Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan. Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Walaupun wawasan agroekosistem merupakan sesuatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan tetapi keberhasilannya dapat dilihat dan

dirumuskan dengan melihat indikator-indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam, kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis.

e. Pengembangan pasar berdasarkan aspek kewilayahan.

Umumnya terdiri dari pasar lokal, regional dan pasar ekspor. Tingkat permintaan (selera konsumen) atau daya serap pasar inilah yang sering mendorong apakah suatu komoditas tersebut dikelompokkan sebagai unggulan atau tidak.

f. Peningkatan infrastuktur transportasi bagi kawasan industri.

Strategi yang perlu diperhatikan pemerintah selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur transportasi yang mendukung bagi kawasan industri, salah satunya adalah kebijakan pemerintah pada Kawasan Duri-Dumai-Rupat menjadi faktor pendorong bagi pengembangan kawasan ini. Kebijakan Pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, terminal agribisnis, balai latihan kerja dan infrastruktur pendukung lainnya pada Kawasan industry yang ditetapkan pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan tersebut. Sehingga dengan tersedianya infrastruktur transportasi tentunya akan mempermudah biaya angkut.

g. Penyediaan Sumber Air Bersih

Sumber air bersih di beberapa kabupaten mengalami masalah dalam mendorong percepatan investasi pedesaan. Semua kabupaten yang menjadi objek kajian ini sektor air bersih, gas dan air bersih sebagai

sektor non basis. Pada hal sektor ini sangat menunjang percepatan investasi di suatu daerah. Sehingga untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor lain pemerintah harus meningkatkan status pengelolaan air bersih daerah

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Pedesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Pedesaan. Kajian ini meliputi 7 Kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak. Jumlah desa di Provinsi Riau pada tahun 2011 sebanyak 1.739 terdiri dari Kuansing (209) desa, Indragiri Hulu (194), Pelalawan (118), Siak (129), Kampar (245), Rohul (153) dan Pelalawan sebanyak 118 desa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor yang memiliki nilai LQ >1 (sektor basis) untuk sektor pertanian adalah Kuansing, Inhu, Rohul, Pelalawan, Rohil dan Pelalawan. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kelebihan dan dapat diekspor ke daerah lain adalah kab. Siak, Rohil dan Kab. Kampar. Sedangkan sektor air bersih, gas dan listrik hampir di setiap kabupaten mengalami permasalahan.

Oleh karena itu, terdapat strategi umum dan strategi khusus peningkatan investasi pedesaan untuk pengelolaan sumber daya pedesaan dalam meningkatkan perekonomian di pedesaan. Strategi umum meliputi Melakukan pengembangan usaha berdasarkan komoditi unggulan daerah, Melakukan penyelesaian status lahan, Melakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Daerah dalam penentuan HGU, Pengembangan kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan, Meningkatkan

kerjasama antar kabupaten/kota terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan Pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya secara luas, baik obyek dan destinasi; prasarana dan sarana pendukung; serta sumber daya manusia pelaku pariwisata, sehingga sebagian besar belum layak dijual kepada wisatawan dan Meningkatkan keterlibatan BUMD dalam sektor usaha potensial.

Selanjutnya strategi khusus meliputi Pengembangan Industri Hilir berdasarkan keunggulan komoditi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, mengintegrasikan sektor usaha untuk peningkatan nilai tambah, Peningkatan ketersediaan energi listrik, pembangunan Desa yang Berkelanjutan, pengembangan pasar berdasarkan aspek kewilayahan, peningkatan infrastuktur transportasi bagi kawasan industry dan Penyediaan Sumber Air Bersih

Rekomendasi

Perlu adanya koordinasi dan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antara unit pemerintahan di Kabupaten di Provinsi Riau. Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah :

1. Pemerintah Provinsi Riau harus meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan jaringan komunikasi yang lebih baik. Disamping itu, perbaikan pada aspek tata kelola pemerintahan juga wajib dilakukan yaitu dengan melakukan pembenahan di bidang keadilan dan kelembagaan seperti penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang `tumpang tindih serta melakukan *full disclosure* terhadap biaya perijinan.
2. Melakukan agenda reformasi dalam peraturan daerah yaitu dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain

- dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda yang terkait dengan perizinan persetujuan investasi yang cenderung memiliki rantai panjang.
3. Pemerintah provinsi dan kabupaten sebaiknya mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi (penanaman modal) sesuai dengan sektor/sub sektor dan komoditas berdaya saing tinggi yang ada di daerahnya.
 4. Perlu dibentuk forum investor secara resmi serta dilakukan secara berkala. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan komoditas yang memiliki daya saing tinggi di masing-masing kabupaten/kota Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Awang dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Juliantara, Dadang et.al. 2003. *politik Pemberdayaan (jalan menuju otonomi Desa)*. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan*. Erlangga, Jakarta
- Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2012. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rauf, Rahyunir. 2010. *Pembaharuan Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Desa*, Jurnal Kybernologi Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, Vol 1 No 1 Juli 2010 : 45
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Solihin, Dadang. 2004. *Strategi Menarik Investor Dalam Rangka Peningkatan PAD*. Disampaikan pada dialog bisnis Interaktif Wilayah Jakarta Pusat 1 Juni 2004, Jakarta.
- Riau Dalam Angka 2012
- Annual Provinsi Riau 2012
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, 2012